

INSPEKTORAT PEKANBARU REVIEW TUNDA BAYAR TAHUN 2024



Sumber gambar:

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/119808/2025/02/02/inspektorat-pekanbaru-review-tunda-bayar-tahun-2024#sthash.ZwLXCctB.dpbs>

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih melakukan review kegiatan tunda bayar tahun 2024. Review perlu dilakukan untuk memastikan mana saja kegiatan yang bisa dianggarkan pada pergeseran.

Saat ini Pemko Pekanbaru melalui Inspektorat tengah melakukan review tunda bayar di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Review juga untuk memastikan berapa jumlah tunda bayar Pemko Pekanbaru tahun 2024 lalu.

Sebelum melakukan review, semua OPD juga sudah diminta untuk melaporkan atau menginput data kegiatan mana saja yang terdampak tunda bayar tahun 2024. Setelah selesai penginputan oleh masing-masing OPD, dilanjutkan dengan review.

Review ini untuk melihat mana saja kegiatan OPD pada tahun 2024 lalu yang belum dibayar, akan dianggarkan pada pergeseran anggaran tahun 2025.

Tentunya, dengan pergeseran anggaran tersebut tidak semua kegiatan akan dibayarkan melalui pergeseran. Prioritas kegiatan yang akan dibayar pada pergeseran diutamakan berkaitan dengan pihak ketiga.

Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Roni Rakhmat mengatakan, semua kegiatan masing-masing OPD sedang dilakukan review oleh Inspektorat.

"Setelah selesai review, baru kita boleh menganggarkan apakah itu di pergeseran atau perubahan. Yang jelas direview dulu oleh Inspektorat," ujar Roni, Ahad (2/2/2025).

Roni menyebut, tunda bayar Pemko Pekanbaru tahun 2024 lalu berkisar Rp300 miliar hingga Rp400 miliar. Saat ini dirinya masih menunggu angka pasti berapa hutang Pemko Pekanbaru tahun lalu.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/119808/2025/02/02/inspektorat-pekanbaru-review-tunda-bayar-tahun-2024#sthash.ZwLXCctB.dpbs>, "Inspektorat Pekanbaru Review Tunda Bayar Tahun 2024", 2 Februari 2025; dan
2. <https://tindaktegas.com/inspektorat-pekanbaru-lakukan-review-tunda-bayar-2024-fokus-pada-prioritas-pembayaran>, "Inspektorat Pekanbaru Lakukan Review Tunda Bayar 2024, Fokus pada Prioritas Pembayaran", 3 Februari 2025.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Penyusunan rancangan perda tentang APBD dilakukan dengan mempedomani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang keduanya telah disusun sebelumnya berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Setiap tahunnya agar perencanaan dan penggunaan APBD bisa berjalan dengan optimal, APBD disusun dengan mengikuti jadwal yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah seluruh kepala SKPD menyusun RKA dan disampaikan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diverifikasi kesesuaiannya terhadap KUA dan PPAS beserta beberapa hal lainnya seperti perencanaan kebutuhan BMD dan Standar Pelayanan Minimal. Kemudian, dilakukan penyempurnaan atas RKA SKPD apabila terdapat ketidaksesuaian, untuk selanjutnya PPKD dapat menyusun rancangan Perda tentang APBD berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan.

Dalam Pasal 104 PP Nomor 12 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Rancangan Perda tentang APBD wajib disusun dan diserahkan oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh hari) sebelum 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk diperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Keterlambatan dalam pengajuan rancangan Perda tentang APBD tersebut ke DPRD dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan untuk mencapai persetujuan bersama, dalam kurun waktu paling lambat 1 (satu bulan) sebelum tahun anggaran berjalan berakhir persetujuan bersama harus sudah tercapai. Apabila sudah disetujui maka Kepala Daerah akan menerbitkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Jika terjadi keterlambatan dalam pencapaian persetujuan bersama ini juga dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah ke DPRD tidak dicapai kesepakatan bersama, maka Kepala Daerah dapat mengeluarkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Perkada ini dapat ditetapkan setelah rancangan perkada tersebut memperoleh pengesahan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten/kota.

Sanksi administratif bagi Kepala Daerah dan DPRD atas keterlambatan penyusunan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada UU tersebut disebutkan bahwa sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi, sanksi tersebut tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh Kepala Daerah yang terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau